

PWI Kota Bandung Gelar Acara Pers Harus Kredibel

Category: Daerah

17 Februari 2025



PWI Kota Bandung Gelar Acara Pers Harus Kredibel

Prolite – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bandung menggelar acara pengukuhan kepengurusan Kelompok Kerja (Pokja) yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kebebasan Pers & Tantangannya di Era Digital”, Sabtu 15 Februari 2025.

Acara yang berlangsung di Avery Hotel Bandung ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di dunia jurnalistik dan komunikasi, termasuk Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilayana.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilayana menggarisbawahi persaingan ketat antara media konvensional dan media sosial dalam menyajikan informasi.

“Saat ini, media harus bersaing dengan kecepatan arus informasi di media sosial. Tantangannya adalah bagaimana menjaga kredibilitas dan menghadirkan berita yang benar-benar informatif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.



dok Pemkot Bandung

Yayan menilai, pentingnya membangun citra positif (branding) Kota Bandung melalui pemberitaan yang akurat dan mendukung perkembangan kota.

Selain itu Diskominfo Kota Bandung mengajak kepada PWI untuk memanfaatkan citizen journalism (CJ) atau jurnalisme warga sebagai salah satu cara memperkaya variasi berita. Dengan melibatkan masyarakat dalam pemberitaan.

Harapannya, informasi yang beredar dapat lebih beragam, relevan, dan dekat dengan kebutuhan publik.

Sedangkan, Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi pers di era digital.

Ia menekankan pentingnya keamanan data dan akurasi dalam pemberitaan, mengingat semakin maraknya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Tantangan pers hari ini bukan hanya kecepatan dalam menyajikan berita, tetapi juga memastikan faktualitasnya. Kita juga harus memberikan perhatian lebih kepada keamanan Data website dan tulisan kita yang diambil oleh AI,” ujar Hilman.

Ia juga menyoroti ancaman lain bagi industri media, yaitu serangan siber seperti Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat melumpuhkan situs berita.

Untuk itu, Hilman berharap media semakin menyadari pentingnya keamanan data dan memberikan ruang bagi hak jawab serta koreksi berita agar kepercayaan publik terhadap media tetap terjaga.

Taman Dewi Sartika, Ruang Hijau Bersejarah di Jantung Kota Bandung

Category: Daerah
17 Februari 2025



Taman Dewi Sartika, Ruang Hijau Bersejarah di Jantung Kota Bandung

Prolite – Taman Dewi Sartika, yang terletak di pusat Kota Bandung, adalah sebuah oase hijau yang menyuguhkan keindahan alam sekaligus melestarikan nilai sejarah.

Taman ini merupakan bagian dari Taman Balai Kota Bandung yang lebih besar. Dengan luas sekitar meter persegi, taman ini menawarkan berbagai fasilitas yang membuatnya menjadi tempat favorit bagi warga Bandung dan wisatawan.

Salah satu daya tarik utama taman ini adalah patung Dewi Sartika, ikon yang menggambarkan tokoh pendidikan dan pahlawan

nasional yang berjuang untuk pendidikan perempuan di Indonesia.



dok Pemkot Bandung

Patung ini menjadi simbol yang tidak hanya memperindah taman, tetapi juga mengingatkan kita pada jasa besar Dewi Sartika dalam dunia pendidikan.

Taman Dewi Sartika memiliki fasilitas yang lengkap untuk berbagai aktivitas. Bagi keluarga, taman ini menyediakan area bermain anak dengan berbagai permainan seperti jungkat-jungkit dan perosotan, menciptakan ruang yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak.

Ada pula jalur pejalan kaki yang memudahkan pengunjung berjalan-jalan santai atau berolahraga ringan di tengah suasana hijau yang menyejukkan.

Selain itu, taman ini juga dilengkapi dengan fasilitas umum yang mendukung kenyamanan pengunjung, seperti toilet umum, tempat sampah, dan area parkir yang luas.

Taman ini juga menawarkan nuansa alami dengan keberadaan beberapa hewan, seperti angsa, ayam dan burung yang unik. Keberadaan hewan-hewan ini menambah daya tarik taman, memberikan pengalaman edukatif dan interaktif bagi pengunjung, terutama bagi anak-anak yang senang berinteraksi dengan satwa.

Sebagai tambahan, taman ini juga berfungsi sebagai terminal Bandros (Bandung Tour on Bus), yang memudahkan wisatawan yang ingin berkeliling kota menggunakan bus wisata tersebut.

Ini menjadikan Taman Dewi Sartika sebagai titik awal yang ideal untuk menjelajahi berbagai destinasi menarik di Bandung.

Dengan berbagai fasilitas ini, Taman Dewi Sartika tidak hanya menjadi tempat untuk bersantai, tetapi juga menjadi ruang sosial yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas

komunitas, seperti diskusi kelompok, latihan seni, atau bahkan piknik.

Taman ini terbuka setiap hari dan menjadi tempat yang nyaman untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, teman, atau sekadar menikmati keindahan alam di tengah kesibukan kota.

Bazar Murah Disdagin Kota Bandung Kembali Digelar, Terdekat Ada di Kecamatan Sukajadi

Category: Daerah
17 Februari 2025



Bazar Murah Disdagin Kota Bandung Kembali Digelar, Terdekat Ada di Kecamatan Sukajadi

Prolite – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung kembali menggelar bazar murah di 30 kecamatan. Ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Salah satu lokasi bazar murah terdekat adalah hari Senin 17 Februari 2025, berlangsung di Lapangan Sepak Bola Abra, Jalan Cipedes Tengah, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul WIB hingga WIB.

Selain di Kecamatan Sukajadi, bazar murah pada 17 Februari juga digelar di Kecamatan Coblong dan Batununggal.



dok Pemkot Bandung

Berbagai kebutuhan pokok tersedia dalam bazar ini, antara lain:

1. Beras premium
2. Minyak goreng
3. Telur ayam
4. Ayam frozen
5. Daging sapi
6. Bawang merah
7. Bawang putih
8. Aneka sayuran dengan harga serba



dok Pemkot Bandung

Selain menjual bahan pangan dengan harga terjangkau, bazar murah ini juga menyediakan layanan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi masyarakat yang ingin mengurus legalitas usaha mereka.

Plt. Kepala Disdagin Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin menyampaikan, program ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok.

“Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih hemat,” ujarnya.

Masyarakat Kota Bandung diimbau untuk datang dan memanfaatkan program bazar murah ini guna mendukung perekonomian lokal serta meningkatkan kesejahteraan bersama.

Jadwal Bazar Murah 2025 Sesi 1 :

- 17 Februari : Kecamatan Coblong, Batununggal dan Sukajadi.
- 18 Februari : Kecamatan Ujung Berung, Buahbatu dan Kiaracacondong.
- 19 Februari : Kecamatan Cinambo, Lengkong dan Arcamanik.
- 20 Februari : Kecamatan Antapani, Andir dan Bojongloa Kaler.
- 21 Februari : Kecamatan Bandung Kulon, Gedebage dan Cibiru.

Informasi tambahan, untuk Kecamatan yang belum tercantum di sesi 1 akan diselenggarakan di sesi 2 yang akan berlangsung pada periode 10-14 Maret 2025 mendatang.

Pemkot Bandung Perkuat Digitalisasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Simonik

Category: Daerah
17 Februari 2025



Pemkot Bandung Perkuat Digitalisasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Simonik

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berkomitmen meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi digital.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkot Bandung menggelar Rapat Koordinasi dan Harmonisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Krisna Beach Hotel, Pangandaran, 12-14 Februari 2025.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan pemahaman terkait keterbukaan informasi serta pengelolaan Aplikasi Permohonan Informasi Publik (Simonik) guna meningkatkan akses informasi bagi masyarakat di era digital.



dok Pemkot Bandung

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota

Bandung, Darto mengatakan, informasi yang dikelola dengan baik menjadi aset berharga bagi masyarakat dan pemerintah.

“Informasi yang transparan dan akurat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat bagi pemerintah,” ujarnya saat membuka acara, Rabu 12 Februari 2025.



dok Pemkot Bandung

Ia juga mengungkapkan, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) nasional mengalami peningkatan pada 2024 menjadi 75,65, dengan Jawa Barat menempati peringkat pertama kategori “Baik” setelah naik dari 84,43 ke 85,22 berdasarkan penilaian Komisi Informasi Pusat.

“Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat telah berubah. Kini masyarakat mengharapkan transparansi, interaksi dua arah, serta akses informasi yang cepat dan bertanggung jawab,” tambahnya.

Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang lebih transparan dan efisien, Pemkot Bandung telah meluncurkan aplikasi Simonik sejak September 2023. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan informasi secara online dengan sistem yang lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik.

Sejak diluncurkan, jumlah permohonan informasi publik melalui Simonik mengalami lonjakan signifikan. Jika pada 2022 hanya ada 20 permohonan, maka pada 2024 jumlahnya meningkat drastis menjadi 327 permohonan.

“Setiap permohonan yang masuk adalah bukti harapan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, layanan informasi publik harus diberikan dengan transparan, cepat, dan akurat,” ujar Darto.

Ia menyebut Pemkot Bandung terus mengembangkan inovasi berbasis digital untuk mendukung prinsip Full Paperless Service, full online (by system), dan No Contact Body dalam pelayanan publik.

Sementara itu, Kepala Bidang Diseminasi Informasi Diskominfo Kota Bandung, Susi Darsiti, menambahkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 77 Admin Simonik dari seluruh OPD, kewilayahan, BLUD, dan BUMD di Kota Bandung.

“Komitmen kita bersama adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya keterbukaan informasi,” ujarnya.

Selama rakor, peserta mendapatkan materi dari Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarak, mengenai keterbukaan informasi di era digital, serta panduan layanan informasi publik yang disampaikan oleh Sub Koordinator Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Diskominfo Kota Bandung, Yusuf Cahyadi.

Penjabat Wali Kota Bandung Sampaikan Usulan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Category: Daerah
17 Februari 2025



Penjabat Wali Kota Bandung Sampaikan Usulan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Prolite – Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara, menyampaikan usulan perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Selasa, 12 Februari 2025.

Dalam rapat Paripurna, Koswara menjelaskan, usulan perubahan ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.

Evaluasi tersebut mengidentifikasi beberapa ketentuan yang perlu diperbaiki, di antaranya perubahan ketentuan umum, pajak barang jasa tertentu, pelayanan retribusi umum, tempat rekreasi, tarif retribusi dan beberapa lainnya.



dok Pemkot Bandung

“Hasil evaluasi ini menunjukkan perlunya perbaikan dan penyesuaian peraturan pajak daerah agar lebih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kebutuhan Kota Bandung,” ujar Koswara dalam sidang yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung.



dok Pemkot Bandung

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandung, Duddy Himawan menegaskan, perubahan ini dinilai mendesak, sehingga perlu dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025.

Nota kesepakatan antara Bapemperda dan Bagian Hukum juga telah disusun sebagai dasar dalam proses legislasi.

Dengan telah disampaikannya usulan perubahan ini, DPRD Kota Bandung akan melanjutkan pembahasan dalam agenda berikutnya.

Pandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap usulan perubahan Raperda ini dijadwalkan akan disampaikan pada Senin, 17 Februari 2025.

Harapannya, usulan perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung peningkatan pendapatan daerah yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat serta pelaku usaha di Kota Bandung.

Jelang Akhir Masa Jabatan,

Pj. Wali Kota Bekasi Silaturahmi ke Kantor-Kantor Kecamatan

Category: Daerah
17 Februari 2025



Jelang Akhir Masa Jabatan, Pj. Wali Kota Bekasi Silaturahmi ke Kantor-Kantor Kecamatan

KOTA BEKASI, Prolite – Jelang akhir masa jabatan, Pj. Wali Kota Bekasi, R. Gani Muhamad bersilaturahmi sekaligus berpamitan ke setiap Kantor Kecamatan di Kota Bekasi, dan pada hari ini, Selasa (11/02) berkesempatan mengunjungi Kecamatan Bekasi Timur dan Kecamatan Bekasi Utara.

Gani Muhamad selaku Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri diamanahkan oleh Mendagri untuk menjalankan tugas menjadi Penjabat Wali Kota Bekasi sejak 20 september 2023 dan akan

berakhir pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang.

Dalam sambutannya, Gani Muhamad menceritakan perjalanan beliau dari sejak diamanahkan menjadi Pj. Wali Kota Bekasi, banyak kisah suka dan duka, akan tetapi tetap bertanggung jawab menjalankan tugas sampai dinyatakan selesai menjalankan tugas sebagai Penjabat Wali Kota Bekasi.

“Sudah kurang lebih 115 hari saya menjabat sebagai Pj. Wali Kota Bekasi, Kota yang penuh dengan berbagai dinamika, telah banyak kisah suka duka saya menjalani tugas, banyak berbagi permasalahan yang datang kepada saya, akan tetapi saya tetap berjuang dan tidak menyerah dalam melaksanakan tanggung jawab sampai selesai,” ungkap R. Gani Muhamad.

Gani Muhamad juga menyampaikan bahwa keberhasilan beliau memimpin Kota Bekasi tidak luput dari dukungan seluruh aparatur Pemerintah Kota Bekasi yang telah membantu roda Pemerintahan berjalan dengan baik serta bersama-sama berperan dalam menjaga kondusifitas wilayah.

“Terima kasih saya haturkan kepada seluruh aparatur dari baik ASN maupun Non-ASN, dari tingkat Dinas/Badan/Kecamatan/Kelurahan, yang telah bahu membahu bekerjasama dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik, saya menganggap Bapak/Ibu sekalian adalah Super Team, tanpa Bapak/Ibu semua saya tidak bisa apa-apa,” imbuh Pj. Wali Kota Bekasi.

Terakhir, Gani Muhamad menutup dengan menyampaikan, “saya pamit, terima kasih atas segala usaha, upaya, dan dukungannya kepada saya selama saya menjabat di Kota Bekasi, jaga Kota Bekasi untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan terus tingkatkan kinerja serta inovasi untuk pembangunan Kota Bekasi,” tutupnya.

M Farhan: Kebijakan Efisiensi Anggaran, Tiadakan Dinas Luar Negeri

Category: Daerah
17 Februari 2025



Efisiensi Anggaran Kurangi Belanja Bukan Kurangi Kesejahteraan Rakyat

BANDUNG, Prolite – Demi ikuti arahan Presiden Prabowo tentang efisiensi anggaran, Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan mengungkapkan bakal meniadakan dinas luar negeri dan tak akan merekrut staf ahli.

Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi terkait efisiensi anggaran. Farhan memastikan efisiensi anggaran untuk mengurangi belanja akan tetapi bukan

untuk mengurangi kesejahteraan masyarakat.

“Yang paling memungkinkan dipotong perjalanan di dinas luar negeri,” ujar Farhan, Rabu (11/2/2025).

Farhan sedang menganalisis perjalanan luar negeri yang dapat dipenuhi dan yang tidak. Kebijakan tersebut, berlaku untuk seluruh dinas di Kota Bandung.

Pihaknya juga akan melakukan kajian-kajian menyangkut efisiensi ini. Selain itu, tidak akan mengangkat staf ahli Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung ke depan sesuai arahan pemerintah pusat.

“Sedang dianalisis sekarang permintaan perjalanan luar negeri yang akan dipenuhi apa, yang tidak akan dipenuhi apa,” katanya.

Namun, ia mengatakan Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi memperbolehkan untuk menggunakan jasa konsultan. Pihaknya masih melakukan kajian dengan terkait mekanisme pembayaran konsultan.

Farhan menambahkan, penyesuaian APBD Kota Bandung dan RPJMD harus sudah selesai pada bulan Juli tahun 2025 mendatang.

” Selanjutnya akan melakukan pembahasan terkait pembagian tugas dengan Wakil Wali Kota Bandung,” tandasnya.

Komisi I DPRD Jabar Menyoroti Pencatutan Nama Warga di

Sertifikat Wilayah Perairan Laut Legon Kulon Kabupaten Subang

Category: Daerah
17 Februari 2025



Komisi I DPRD Jabar Menyoroti Pencatutan Nama Warga di Sertifikat Wilayah Perairan Laut Legon Kulon Kabupaten Subang

KABUPATEN SUBANG, Prolite – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti permasalahan pencatutan ratusan nama warga dalam penerbitan sertifikat di wilayah perairan laut di daerah Legon Kulon, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Koordinator Komisi I DPRD sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono mengatakan, ratusan hektare wilayah perairan laut di Subang telah bersertifikat dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM).

Laut seluas 462 hektare yang membentang dari Teluk Cirewang,

Desa Pangarengan, Kecamatan Legonkulon, hingga perairan Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang telah bersertifikat menjadi 307 bidang. SHM laut tersebut diterbitkan oleh ATR/BPN Subang melalui Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada tahun 2021.

“Terdapat ratusan nama warga Subang dicatut namanya untuk penerbitan sertifikat tanah dalam program TORA pada 2021. Ironisnya, warga yang namanya dicatut bukanlah warga setempat, bahkan mereka mengaku tidak tahu memiliki sertifikat di laut,” ungkap Ono Surono, usai kunjungan kerja ke ATR/BPN, Kabupaten Subang, Selasa, (11/2/2025).



dok DPRD Provinsi

Meskipun saat ini status sertifikat laut di perairan Kabupaten Subang tersebut sudah dibatalkan. Namun, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan terus menelusuri kasus pencatutan nama sejumlah nelayan sebagai pemilik sertifikat laut di perairan Subang.

“Saat ini, semua sertifikat itu sudah dibatalkan oleh BPN Provinsi Jawa Barat dan Kejaksaan Agung karena cacat prosedural, cacat hukum, dan cacat administrasi,” tegasnya saat melakukan kunjungan kerja bersama Komisi I DPRD Jawa Barat ke kantor ATR/BPN Kabupaten Subang.

Pemdaprov Jabar lanjut Ono Surono, kini sedang menelusuri siapa dalang di balik pembuatan sertifikat laut di Subang yang mencatut nama sejumlah nelayan tersebut. Penelusuran perlu dilakukan agar tidak ada warga yang dirugikan.

“Saat ini kami tengah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan sertifikat ini. Kami ingin masalah ini tidak berhenti di pembatalan saja, tetapi berlanjut ke proses hukum siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini. Sehingga tidak terjadi lagi kejadian seperti ini di wilayah-wilayah lainnya yang mengorbankan masyarakat,” ucap dia.

Sementara itu Kepala ATR/BPN Kabupaten Subang Hermawan menyebutkan, ratusan bidang yang disertifikatkan itu dulunya merupakan daratan. Hal itu merujuk pada peta 1942. Saat pengukuran terbaru yang dilakukan pada 2021, lahan tersebut sedikit tergenang dan kini sudah jadi lautan akibat abrasi.

“Segala sesuatu bisa terjadi, adanya tanah timbul, tenggelam dan sebagainya,” kata Hermawan.

Untuk diketahui, Komisi I DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke ATR/BPN Kabupaten Subang. Kunjungan kerja kali ini dipimpin langsung oleh Koordinator sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan informasi bersama ATR/BPN Kabupaten Subang terkait permasalahan sertifikasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Koswara: Kota Bandung Kondusif Pasca Pilkada, Siap Hadapi Transisi Kepemimpinan

Category: Daerah
17 Februari 2025



Koswara: Kota Bandung Kondusif Pasca Pilkada, Siap Hadapi Transisi Kepemimpinan

BANDUNG, Prolite – Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran selama menjabat dari periode 20 September 2024-20 Februari 2025 mendatang.

Salah satunya adalah kesuksesan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kota Bandung.

Ia mengatakan, kondisi kota tetap aman dan kondusif, serta tidak ada sengketa hasil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini menunjukkan proses demokrasi di Kota Bandung berjalan dengan baik dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

“Alhamdulillah, Kota Bandung tetap dalam kondisi kondusif usai Pilkada, tidak ada perselisihan hasil yang sampai ke MK. Ini bukti bahwa sistem dan mekanisme yang telah kita bangun selama ini berjalan dengan baik,” ujar Koswara di Balai Kota Bandung,

Selasa, 11 Februari 2025.

Sebagai penjabat wali kota yang bertugas sejak September 2024, Koswara menegaskan, dirinya telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan kontribusi bagi Kota Bandung, meskipun masa jabatannya terbatas.

Fokus utamanya adalah memperbaiki regulasi, memperkuat mekanisme kerja birokrasi, dan memastikan pembangunan kota tetap



dok Pemkot Bandung

berjalan dengan baik.

Capaian Selama Menjabat

Sepanjang masa jabatannya, Koswara telah mencatat sejumlah capaian strategis, di antaranya:

1. Penataan Regulasi dan Penguatan Birokrasi
 - Menyelesaikan sejumlah peraturan daerah dan kebijakan strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
 - Memastikan jalannya program-program prioritas yang telah direncanakan sebelum masa transisi kepemimpinan.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Sampah
 - Mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA Sarimukti, dari 170 ritase per hari menjadi 157 ritase.
 - Menegaskan kebijakan “tidak dipilah, tidak diangkut”, sehingga masyarakat didorong untuk lebih aktif memilah sampah dari sumbernya.
 - Memberikan sanksi tegas kepada pihak yang tidak mengelola sampah dengan baik, termasuk pengelola pasar dan kawasan perdagangan.
3. Peningkatan Infrastruktur Transportasi
 - Melakukan kajian terkait pengaturan jam operasional

untuk mengurangi kemacetan, khususnya di sektor pendidikan, pemerintahan, dan komersial.

- Mengupayakan percepatan pembangunan proyek Tol Dalam Kota (Bypass Urban Transport – BUTR) sebagai solusi jangka panjang transportasi Bandung.

4. Penguatan Kolaborasi dengan Masyarakat

- Mengembangkan pendekatan Bandung Kolaborasi, di mana pemerintah bekerja sama dengan komunitas dan pelaku usaha dalam berbagai program sosial dan pembangunan kota.

Koswara menuturkan, keberlanjutan program yang telah dirancang sangat penting agar Kota Bandung dapat terus berkembang.

Oleh karena itu, ia berharap pemimpin yang terpilih dalam Pilkada 2024 dapat melanjutkan kebijakan yang telah berjalan.

“Saya ingin memastikan bahwa pemimpin selanjutnya dapat meneruskan kebijakan yang telah kita bangun bersama. Kota Bandung memerlukan kesinambungan dalam pembangunan agar tidak terjadi ketidakkonsistenan yang bisa menghambat kemajuan,” ujarnya.

Koswara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah, serta masyarakat Kota Bandung yang telah mendukung berbagai program selama masa kepemimpinannya.

“Alhamdulillah, saya bersyukur bisa menjalankan amanah ini. Saya berharap semua yang telah kita upayakan bersama mendapatkan ridho Allah SWT dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Bandung,” pungkasnya.

Pengelolaan Zona Taman di Kota Bandung Demi Ruang Hijau yang Tertata dan Nyaman

Category: Daerah
17 Februari 2025



Pengelolaan Zona Taman di Kota Bandung Demi Ruang Hijau yang Tertata dan Nyaman

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) demi menciptakan lingkungan yang nyaman, sehat, dan berkelanjutan bagi warganya.

Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung, Luthfi Firdaus menjelaskan, Kota Bandung memiliki sekitar 2 juta meter persegi taman kota, yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga kualitas taman dengan berbagai strategi, termasuk evaluasi berkala dan revitalisasi taman yang sudah ada.

“Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan taman adalah kesinambungan perawatan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kami juga mendorong edukasi publik agar masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga taman-taman yang ada,” ujar Luthfi saat siaran kolaborasi antara Radio Sonata dan Radio PR FM, Selasa 11 Februari 2025

Siaran ini juga menghadirkan sejumlah DPRD Kota Bandung dan sejumlah tantangan dan solusi dalam pengelolaan taman kota dibahas secara mendalam.

Luthfi menyampaikan ada perubahan paradigma dalam desain taman kota. Jika sebelumnya banyak taman yang dipagari untuk mencegah kerusakan, kini taman lebih terbuka agar dapat dinikmati oleh masyarakat.

Hal ini juga membawa konsekuensi berupa peningkatan pengawasan dan pemeliharaan agar taman tetap berfungsi optimal.

“Keberlanjutan taman kota bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat. Mulai dari menjaga kebersihan, menghindari aksi vandalisme, hingga melaporkan jika ada fasilitas yang rusak,” ungkapnya.

Peningkatan jumlah dan kualitas taman di Kota Bandung tidak hanya berdampak pada keindahan kota, tetapi juga pada kesehatan lingkungan dan kesejahteraan warga.

“Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, DPRD, swasta, dan masyarakat, diharapkan Kota Bandung dapat mencapai target RTH yang ideal dan menghadirkan ruang hijau yang lebih nyaman serta tertata dengan baik,” tuturnya.

Sedangkan Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah menegaskan, DPRD terus menampung aspirasi masyarakat terkait kebutuhan RTH melalui program reses dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Kota Bandung saat ini memiliki cakupan RTH sekitar 12,8%, yang

masih jauh dari target 30% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, perlu strategi untuk memperluas dan mempertahankan keberadaan taman kota.

“Tantangan utama kita adalah keterbatasan lahan akibat pesatnya urbanisasi. Maka, perlu sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengidentifikasi aset-aset yang berpotensi dijadikan taman kota,” ujar Nunung.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Bandung lainnya, Yoel Yosaphat menekankan pentingnya perawatan taman yang sudah ada.

Ia mengungkapkan, banyak taman yang kondisinya kurang terawat, mulai dari sampah yang berserakan hingga penerangan yang kurang memadai, yang dapat memicu tindakan vandalisme dan penyalahgunaan ruang publik.

“Kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan pemeliharaan taman berjalan optimal. Bahkan, kami berencana mengadakan pertemuan rutin dengan dinas guna memantau progres perbaikan dan pembangunan taman di Kota Bandung,” kata Yoel.